

EKSISTENSI FORUM KOMUNIKASI JAMAAH AHLUSSUNNAH WAL-JAMAAH DI PALU

*Fenomena Persilangan Arm Global dan
Resistensi Lokal dalam Hubungan Umat Beragama*

ABD. KADIR AHMAD

Abstrak

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan bertujuan untuk mendeskripsikan profil dan aktivitas Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah sebagai salah satu gerakan Islam kontemporer yang tumbuh dan berkembang pada awal era reformasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam menangani berbagai gerakan keagamaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kehadiran FKAJW merupakan jawaban terhadap ketidakmampuan aparat keamanan dan penegak hukum memulihkan ketertiban dan menegakkan supremasi hukum. Pengaruh kehadiran FKAJW di Palu amat terasa bagi umat Islam khususnya yang ada di daerah konflik. Hal ini dirasakan sebagai dukungan bagi perjuangan mereka mempertahankan diri dari pihak lain. Pengaruhnya juga dirasakan masyarakat dalam hal dakwah dan pendidikan Islam yang diselenggarakan meskipun waktunya cukup singkat. Akan tetapi bersamaan dengan itu resistensi juga muncul dengan rasionalisasi bahwa keikutsertaan pihak luar justru akan lebih memperkeruh suasana.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan reformasi yang telah dan masih terus berlangsung ditandai dengan adatiya perubahan pada beberapa aspek vital kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdampak langsung pada sikap, tata nilai, dan norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Perubahan yang nampak sangat menonjol adalah adanya tuntutan perbaikan seluruh aspek kehidupan secara cepat dan mendasar. Iklim keterbukaan yang pada kenyataannya tidak cukup diimbangi oleh kontrol hukum dan sosial sebagai

akibat rendahnya wibawa aparat penegak hukum di mata rakyat membuat legitimasi hukum menjadi sangat rendah. Lemahnya kontrol hukum dan sosial dapat berakibat pada munculnya berbagai penyimpangan nilai-nilai sosial yang bertentangan dengan norma sosial dan agama yang berlaku, sehingga mengarah pada terjadinya krisis yang berkepanjangan.

Untuk dapat keluar dari krisis berkepanjangan tersebut, masyarakat Indonesia dewasa ini tengah menapak pada upaya membangun masyarakat baru yang adil dan makmur. Banyak kiprah reformatif digulirkan dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik. Proses tersebut semuanya bermuara pada usaha membangun struktur sosial yang kondusif bagi tumbuhnya gerakan-gerakan kultural yang mampu mendorong terciptanya masyarakat madani yang memiliki peradaban yang tinggi.

Dalam menggapai masyarakat yang diimpikan tersebut muncul berbagai gerakan. Dalam bidang politik lahir berpuluhan-puluhan partai politik yang memiliki ideologi yang beraneka ragam. Dalam bidang sosial kemasyarakatan lahir berbagai organisasi sosial yang bergerak dalam berbagai lapangan kehidupan. Di bidang keagamaan lahir berbagai organisasi keagamaan yang berwujud serbagai gerakan keagamaan kontemporer, seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Ahlussunnah wal-Jamaah (Laskar Jihad), Laskar Hisbullah, Laskar Jundullah, Majelis Mujahidin Indonesia, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan masih banyak lagi. Kelompok-kelompok keagamaan ini muncul sebagai reaksi atas ketidakmampuan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang telah ada dalam menyikapi perubahan paradigma yang terjadi pada masa reformasi. Pada tahap selanjutnya mereka mengembangkan interpretasi moral tidak saja yang berkaitan dengan perubahan tatanan sosial, tetapi juga menyangkut bidang ekonomi, politik, dan koreksi total terhadap kebijaksanaan pemerintah, serta cita-cita penegakan hukum yang konsisten dalam memberantas kemaksiatan serta pelanggaran moral agama. Gerakan-gerakan kontemporer tersebut dalam waktu yang sangat singkat telah mampu menampakkan pengaruh yang kuat dalam masyarakat.

Melihat fenomena di atas, penting dilakukan studi terhadap gerakan Islam kontemporer pada era reformasi untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang gerakan tersebut, sehingga dapat menjadi landasan dalam mengambil kebijakan, sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau praduga yang kurang proporsional terhadap gerakan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Proyek Penelitian dan Pengembangan Perumusan Kebijaksanaan

Departemen Agama menganggap perlu melakukan studi terhadap Gerakan Keagamaan Islam Kontemporer pada Era Reformasi. Salah satu gerakan yang menjadi sasaran penelitian tersebut adalah Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah dengan mengambil kasus di Kota Palu Sulawesi Tengah.

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil dan aktivitas Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah sebagai salah satu gerakan Islam kontemporer yang tumbuh dan berkembang pada awal era reformasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam menangani berbagai gerakan keagamaan

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu mengkaji secara mendalam dan berbagai aspek tentang gerakan keagamaan. Sebagai suatu penelitian kebijakan, penelitian yang berbentuk studi kasus juga dianggap relevan karena penelitian ini dapat memberikan nilai tambah yang unik tentang kehidupan sosial keagamaan (Yin, 1997). Di dalam memahami data, peneliti menggunakan perspektif fenomenologis. Melalui perspektif ini peneliti mencoba mencari pemahaman (*understanding*) terhadap berbagai fenomena sebagaimana fenomena tersebut difahami dan dimaknai oleh para pelakunya (Bogdan and Taylor, 1992).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan, studi dokumen dan kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap pemimpin atau pengikut gerakan serta pemerintah dan masyarakat bukan pengikut gerakan tersebut. Pengamatan lapangan dilakukan di tempat-tempat tertentu khususnya di tempat sentral kegiatan gerakan. Sedangkan kajian kepustakaan dan dokumen untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dengan mengkaji berbagai bentuk informasi (tabloid, leaflet, dokumen historis) dan buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini dilakukan di kota Palu Sulawesi Tengah. Palu merupakan salah satu basis gerakan Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah di kawasan Timur Indonesia. Selain karena faktor geografis yang merupakan pusat pemerintahan provinsi, Palu merupakan sentra gerakan Islam untuk mengantisipasi ketegangan di daerah konflik, khususnya Poso. Data yang

terkumpul diolah secara kualitatif kemudian ditulis secara deskriptif sebagaimana penulisan laporan penelitian yang biasa dilakukan oleh para peneliti.

II. KERANGKA TEORI

Pengetahuan empirik mengenai gerakan Islam kontemporer, khususnya dalam kasus Indonesia juga masih amat langka. Dalam hal konsep teoretis, patut dicatat pendapat Sharon Shiddiqie yang menyatakan bahwa studi tentang Islam kontemporer di Asia Tenggara, ternyata kurang memuaskan oleh karena keterbatasan konseptualisasinya (Shiddique, 1978: 74). Masalah utamanya menurut Shiddiqie terletak pada kurang memadainya konsep-konsep sosiologis Barat tentang agama, yang menempatkan individu pada pusat analisis, sementara Islam tidak semata-mata mengandung rumusan hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga rumusan tentang tatanan sosial kemasyarakatan, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, menurutnya, implikasi paling fundamental kebangkitan Islam kontemporer adalah usaha yang giat untuk mengarahkan segala tatanan masyarakat pada sebuah bentuk visi tentang realitas yang berinspirasikan ideologi dan kanonik (sistem tata hukum).

Masalah lainnya adalah berkaitan dengan pendekatan studi ideologi terhadap Islam Kontemporer. Suatu studi tentang ideologi yang memberikan tekanan pada pandangan bahwa ideologi bukan hanya dilahirkan tetapi juga dilestarikan, akan membawa Islam Kontemporer pada dua perspektif ideologis yang saling berlawanan, yaitu yang universalistik dan partikularistik. Perspektif pertama lahir dari watak Islam yang bersifat kanonik yang memberikan landasan bagi ajaran bahwa Islam adalah pedoman hidup yang lengkap dan dapat diterapkan secara universal menembus batas ruang, waktu, ras, bahasa dan lain-lain. Sedangkan perspektif kedua lahir sebagai produk realitas sosial politik yang berbeda-beda, khususnya di Dunia Ketiga yang masih relatif baru memperoleh kemerdekaan, dimana salah satu kunci guna memahami perbedaan tersebut terletak pada pangujian keterlibatan Islam dalam konsep nasionalisme (Shiddiqie, 1978: h.17). Upaya-upaya pelestarian dan penyebaran kedua perspektif ideologis ini pastilah memuat prasyarat-prasyarat yang berbeda, dengan konsekuensi yang berbeda pula.

Guna keperluan pemahaman terhadap gerakan Islam kontemporer di Indonesia, kajian ini akan bertolak dari tinjauan terhadap pandangan yang memahami Islam di Indonesia dari dua paradigma, yaitu Islam tradisional dan Islam Modernis. Studi mengenai gerakan Modern Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Deliar Noer (1980:136) membedakan Islam Tradisional dan Islam Modern sekurang-kurangnya dari tiga aspek. *Pertama*, semangat pemurnian ajaran. Semangat inilah yang telah menumbuhkan upaya-upaya dari Islam modernis untuk membersihkan ajaran Islam dari apa yang mereka sebut sebagai bid'ah, takhayul, dan khurafat (TBC), yang menurut mereka masih dianut oleh kebanyakan masyarakat Islam di Indonesia. *Kedua*, sikap terhadap tradisi bermazhab, khususnya di bidang fiqh, yang kemudian menimbulkan perselisihan di sekitar masalah khilafiyah dan masalah taklid. Islam modernis menggugat tradisi ini, sementara Islam tradisionalis mempertahankannya. *Ketiga*, sikap terhadap perubahan dan rasionalitas. Secara umum, Islam tradisionalis digambarkan sebagai kurang menyukai perubahan dan lebih cenderung mempertahankan kebiasaan yang telah dianut, sementara Islam modernis sebaliknya, menghendaki pembaharuan-pembaharuan.

Dengan memperhatikan ketiga aspek di atas, maka pembicaraan mengenai paradigma dikotomis tradisionalis dan modernis akan sampai pada identifikasi mengenai gerakan-gerakannya. Di bidang sosial, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan gerakan Islam Tradisionalis yang paling menonjol di samping Tarbiyah Islamiyah (Perti), sedangkan Muhammadiyah paling menonjol di kalangan modernis, di samping Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, dan sebagainya. Di bidang politik, kaum Islam tradisionalis diwakili oleh NU, Perti dan lain-lain, sedangkan kaum modernis diwakili oleh Masyumi, Partai Syarikat Islam Islam Indonesia (PSII) dan sejenisnya.

Pada umumnya gerakan-gerakan Islam baik yang tradisionalis maupun yang modernis muncul sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu periode waktu antara 1900-1940-an. Akar-akar gerakan Islam tradisional telah bersemi sekurang-kurangnya bersamaan dengan masuk dan semakin meluasnya pemelukan Islam di pedalaman Jawa pada saat mana Islam mulai mengalami proses menyerap dan diserap oleh unsur-unsur budaya lokal. Proses yang lazim pula disebut sebagai 'domestifikasi Islam' itu berlangsung sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, dalam mana aspek-aspek mistik dan ajaran Islam tasawuf menunjukkan pengaruh kuat (Ziemek, 1986:142)

Sementara itu, akar-akar gerakan modern Islam dapat dilacak melalui pengaruh gerakan reformasi yang dilakukan Jamaluddin Al-Afghani, MuhammadAbduh dan lain-lainnya, terhadap sejumlah jema'ah haji muda Indonesia yang belajar kepada murid-murid mereka di Mekah atau melalui terbitan-terbitan tentang pemikiran mereka seperti majalah Al-'Urwat al-Wutsqa dan Kitab Tafsir Al-Manar.

Menurut penulis dikotomisasi Islam tradisionalis yang diwakili oleh NU dan modernis yang diwakili Muhammadiyah tidak relevan lagi sekarang ini. Generasi baru NU bahkan sudah melangkah cukup jauh dengan mengembangkan pemikiran liberal di kalangan umat Islam di Indonesia, sementara di kalangan Muhammadiyah ada kecenderungan bergerak ke arah yang konservatif dan fundamentalis. Gerakan Islam dengan demikian tidak lagi dapat disederhanakan ke dalam tradisionalis-modernis tetapi varian-varian gerakan baru bermunculan membuat wajah Islam Indonesia lebih kompleks.

Pada tahun 70-an sampai era 80-an berkembang gerakan keagamaan seperti Islam Jama'ah, kelompok Islam Isa Bugis, Jama'ah Islam Qur'ani, Gerakan Kaum Muda Masjid Salman, Kelompok Islam Jogjakarta (Jamaah Mardiyah, Jama'ah Masjid Shalahuddin dan Masjid Syuhada) (Abdul Aziz, 1989:8-9).

Dari tinjauan ilmu sosial, gerakan keagamaan dapat digolongkan ke dalam gerakan sosial, yaitu suatu usaha kolektif untuk mempromosikan atau menentang perubahan di dalam suatu masyarakat atau satu kelompok. Tingkat perubahan yang diadvokasi bervariasi menurut menurut tipe-tipe gerakan sosial yang ada, apakah gerakan itu bersifat politik, keagamaan atau gerakan mahasiswa. Gerakan-gerakan tertentu menuntut perubahan revolusioner secara menyeluruh, sementara gerakan-gerakan lainnya menuntut perubahan dalam bidang tertentu dan bersifat moderat. Level perubahan baik berupa perubahan struktur sosial maupun perubahan sikap, kehidupan spiritual, dan gaya hidup juga bervariasi dari tingkat nasional atau global.

Ilmuwan sosial telah menaruh perhatian terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya gerakan sosial. Teori dan penelitian awal menunjukkan bahwa gerakan sosial muncul ketika masyarakat mengalami ketegangan struktural, misalnya ketika terjadinya perubahan sosial yang cepat. Teori '*Break Down*' ini menyatakan bahwa terjadinya pengaturan ulang struktural secara luas dalam masyarakat, misalnya, urbanisasi dan industrialisasi membawa kepada terputusnya kontrol sosial dan

mempertinggi dorongan terhadap prilaku anti-sosial (Tilly, Tilly, and Tilly 1975). Sebab itu, *'BreakDown"* sistemik ini dikatakan sebagai menyebabkan meningkatnya gerakan sosial.

Faktor lain adalah struktur kesempatan politik. Hal ini mengacu kepada reseptivitas atau kerentanan sistem politik terhadap protes yang terorganisir dari suatu gerakan sosial. Penelitian tentang gerakan hak-hak warga negara, misalnya mengindikasikan bahwa kemunculan gerakan difasilitasi oleh serangkaian perubahan yang saling berkaitan dalam struktur kesempatan politik. Faktor makro yang lain, yang dilihat oleh peneliti, adalah hilangnya tekanan (represi). Gerakan sosial kadang-kadang menghindari kekerasan atau respon represif dari penguasa, bukan hanya selama terjadinya krisis pemerintahan, tetapi juga selama periode dimana peluang politik semakin meluas.

Organisasi pribumi merupakan faktor struktural major ketiga yang berkaitan dengan kemunculan gerakan. Organisasi yang sudah ada berfungsi sebagai jaringan komunikasi bagi anggota masyarakat yang kurang puas. Mereka juga menyiapkan basis untuk memobilisasi sumberdaya yang diinginkan guna mendukung sebuah gerakan. Gereja, misalnya, merupakan organisasi pribumi yang penting yang menyokong munculnya gerakan perdamaian, hak-hak sivil, dan gerakan moral pada umumnya.

Terakhir, beberapa sarjana Eropa menyatakan bahwa intervensi negara ke dalam domain kehidupan privat telah membangkitkan gerakan sosial baru. Menurut perspektif ini, berbagai perubahan struktural di masyarakat industri modern, khususnya perubahan sistem produksi, membawa suatu negara untuk mengontrol wilayah privat yang ada sebelumnya. Konsekuensinya, wilayah privat seperti hubungan seksual, identitas biologis, kelahiran dan kematian, kesakitan dan ketuaan, dan hubungan seseorang dengan alam telah memasuki wilayah konflik publik. Gerakan sosial baru, seperti gay, eutanasia dan lingkungan muncul untuk mendapatkan wilayah dari pemerintah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor struktural sangat penting bagi munculnya gerakan sosial. Namun demikian, faktor struktural saja tidak cukup untuk munculnya suatu gerakan. Para sarjana menelusuri adanya faktor-faktor interaksi mikro bagi munculnya suatu gerakan.

Bagian besar penelitian memfokuskan pada proses interpretasi kekecewaan atau keluhan. Hal ini mengacu kepada cara dengan apa masyarakat secara kollektif sampai pada definisi yang sama mengenai situasi

atau 'frame penafsiran' yang sama mengenai perubahan sosial yang mereka dukung atau tentang (Tilly, Tilly, and Tilly, 1975)

Kesimpulannya, gerakan sosial mungkin sekali terjadi pada saat kondisi struktural untuk mobilisasi sudah matang dan ketika penafsiran kolektif mengenai kekecewaan menghasilkan semacam pembebasan secara kognitif

III. PALU DAN REALITAS KERAGAMAN

A. Letak Geografis

Kota Palu adalah ibukota Propinsi Sulawesi Tengah terletak disebelah Utara garis khatulistiwa dalam koordinat $0^{\circ}35-0^{\circ}56$ lintang Selatan dan $119^{\circ}45-120^{\circ}1$ Bujur Timur. Secara administratif kota Palu berbatasan dengan Kecamatan Tawaili dan teluk Palu di sebelah Utara; Kecamatan Tawaili dan Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala di sebelah Timur; Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru di sebelah Selatan; serta Kecamatan Banawa dan Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala di 'sebelah Barat. Kota Palu terletak pada ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut. Keadaan topografinya datar hingga pegunungan. Dataran rendahnya umumnya tersebar di sekitar pantai dan merupakan bagian terbesar dari keseluruhan wilayah (BPS Palu, 200).

Luas wilayah kota Palu adalah 359,06 ha, dibagi ke dalam empat kecamatan, dan 43 kelurahan. Kecamatan-kecamatan dimaksud adalah Palu Barat (15 kelurahan), Palu Selatan (12 kelurahan), Palu Timur (8 kelurahan), dan Palu Utara (8 kelurahan).

B. Struktur Sosial

Lembah Palu merupakan salah satu daerah terkering di Indonesia dengan curah hujan hanya 400-800 mm per tahun. Namun demikian, hujan sore hari (*afternoon rain*) yang turun hampir sepanjang tahun di daerah pegunungan sekitar membuat banyak sungai mencurahkan airnya ke lembah Palu. Sebagai hasilnya, sawah-sawah luas terbentang di kedua sisi Sungai Palu meliuk-liuk di punggung lembah. Pepohonan kelapa yang tumbuh dimana-mana menjadi sumber pemasukan tunai bagi penduduk lembah tersebut. Meski demikian, wilayah-wilayah yang jauh dari aliran air dari lembah dan terletak dekat pantai merupakan daerah padang rumput yang

sangat luas (savana). Seorang Controleur Belanda, Ter Laag, sebagaimana dikutip Acciaioli (1989:65), melukiskan keadaan wilayah tersebut awal abad ke-20, sebagai :

Daerah yang datar dimana pegunungan terletak jauh dari pesisir, dan lahan yang ada di bawahnya dipenuhi dengan tumbuhan alang-alang. Pepohonan jarang ditemukan, menimbulkan pemandangan yang gersang dan kering yang kurang menjanjikan. Sebagai pengganti pepohonan yang keras ditemukan tumbuhan kaktus yang luas, membuat akses ke wilayah ini agak sulit.

Gambaran demikian tidak berarti kehidupan masyarakat mengalami kesulitan, karena persediaan makanan dari sumber-sumber lain cukup tersedia bahkan melimpah, terutama dari hasil perkebunan kelapa.

Dahulu, wilayah Kaili terdiri dari gugusan desa-desa kecil, yang masing-masing diperintah oleh seorang *raja*. Setiap desa merupakan komunitas yang berdiri sendiri. 'Kerajaan-kerajaan' ini hampir menyerupai tatanan sosial-politik di Sulawesi Selatan sebelum terjadinya penggabungan komunitas-komunitas desa yang berdiri sendiri tersebut ke dalam suatu kerajaan yang lebih besar di bawah pemerintahan seorang *Tumanurung*'.

Gelar raja biasanya disebut Magau, suatu istilah untuk pemerintah yang juga ditemukan di berbagai bentuk kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan. Dengan adanya istilah ini dan adanya konsep *Tumanurung* menunjukkan kuatnya dominasi kelompok pendatang dari Sulawesi Selatan. Menurut penulis, istilah *magau* lebih dekat dengan istilah Makassar daripada Bugis. Di Makassar, *maggau* diberikan kepada seseorang yang sedang memerintah sedangkan pemerintahannya disebut *gaukanna*. Orang yang meninggal dalam masa pemerintahan disebut *tumenanga rigaukanna* (raja yang meninggal selagi masih memerintah).

Berdasarkan hasil sensus tahun 2000 jumlah penduduk kota Palu tercatat 268.322 jiwa, terdiri dari 134.307 laki-laki dan 134.015 jiwa perempuan. Konsentrasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Palu Selatan, menyusul Palu Barat, Palu Timur dan Palu Utara. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 3,12 persen per tahun. Pertambahan penduduk mengalami peningkatan di atas angka pertumbuhan tersebut dari tahun 1996 sampai 2000. Pada tahun 1996 jumlah penduduk kota Palu 224.406 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 268.322 jiwa. Jadi terjadi pertambahan penduduk sebesar 43.916 jiwa dalam waktu 5 tahun terakhir atau sekitar 20 persen atau rata-rata 4 persen per tahun.

Propinsi Sulawesi Tengah, dimana Palu adalah bagian daripadanya, adalah salah satu daerah dengan variasi etnis yang cukup besar. Tercatat sebanyak 12 kelompok etnik di daerah ini, yaitu Kaili, Tomini, dan Kulawi. Ketiganya umumnya berdiam di Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Kelompok etnik Pamona, Lore, Mori, dan Bungku, umumnya berdiam di Kabupaten Poso. Kelompok-kelompok etnik Saluan, Balantak, dan Banggai umumnya bermukim di Kabupaten Luwuk Banggai. Sedangkan kelompok etnik Toli-toli dan Buol umumnya bermukim di Kabupaten Buol Toli-Toli.

Cara pengelompokan etnik tersebut didasarkan pada pengelompokan bahasa atau nama tempat pemukiman. Di antara kekeda belas kelompok etnik yang menjadi penduduk asli Sulawesi Tengah ini, etnik Kaili merupakan etnik yang jumlahnya paling besar, kira-kira 45 persen (Mattulada, 1991: 114-115).

Para penulis asing, antara lain, seperti N.Adriani, Albert C.Kruijt, W.Kauden mengidentifikasi orang-orang yang mendiami kawasan yang sekarang masuk wilayah Sulawesi Tengah sebagai orang Toraja. Hal itu masih dianut ilmuan sekarang baik bangsa Indonesia maupun orang asing.

Welter Kauden, seperti dikutip Mattulada (1991), mengelompokkan penduduk Sulawesi Tengah ke dalam empat kelompok besar, yaitu Toraja Palu, Toraja Karo, Toraja Poso, dan Toraja Sa'dan. Pembagian ini berbeda dengan pengelompokan yang dilakukan oleh penyebar Injil berkebangsaan Belanda Dr. N.Adriani dan Dr.Albert C.Kruijt yang mengelompokkan penduduk Sulawesi Tengah ke dalam kelompok Toraja Timur (Toraja Poso), Toraja Barat (orang Kaili Parigi), dan Toraja Sa'dan.

Seperti disebutkan sebelumnya suku terbesar di Sulawesi Tengah adalah suku Kaili atau To-Kaili. Suku atau kelompok etnik ini pada umumnya menempati Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Orang-orang Kaili biasa menyebut dirinya sesuai dengan tempat tinggal seperti To-Palu, To-Sigi, To Dolo, To-Biromaru, To-Kulawi, To-Parigi dan lain-lain.

Cacah jiwa orang Kaili tersebar luas dalam Propinsi Sulawesi Tengah, diperkirakan 45 persen dari seluruh penduduk Sulawesi Tengah. To-Kaili pada umumnya atau terbanyak bermukim di sepanjang pantai, baik di pesisir Barat, maupun di Pesisir Timur. Oleh karena itu, maka cara hidup dan kebudayaan Kaili yang dominan, kelihatan lebih dekat kesamaannya kepada kebudayaan Bugis-Makassar (Sulawesi Selatan), dan Kebudayaan Melayu (Sumatera dan Malaka).

C. Kehidupan Beragama

Dilihat dari segi agamanya masyarakat Kotamadya Palu sangat heterogen. Hal ini disebabkan karena Palu merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, perindustrian, dan pariwisata, sehingga mengundang datangnya urbanisasi dari desa-desa dan migrasi dari berbagai suku bangsa, seperti Toraja, Mandar, Bugis, Jawa, Minang, Arab, Cina dan sebagainya yang masing-masing suku bangsa membawa agama dan kepercayaannya masing-masing.

Menurut data tahun 2000, persentase penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 89,13 persen, Kristen 6,03 persen, Katolik 2,81 persen, Hindu 1,25 persen, dan Budha 0,78 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kotamadya Palu mayoritas beragama Islam. Penduduk yang memeluk agama Islam pada umumnya terdiri dari suku Kaili yang merupakan suku asli, suku Bugis, Mandar, dan Makassar yang merupakan penduduk pendatang dari Sulawesi Selatan.

Penganut setiap agama dari lima agama tersebut tidaklah mengelompok di dalam satu wilayah pemukiman tertentu, akan tetapi menyebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kotamadya, sehingga setiap kecamatan terdapat penganut agama yang berbeda-beda.

Pelaksanaan kegiatan keagamaan berpusat di rumah-rumah ibadah. Jumlah rumah ibadah di Kotamadya Palu sebanyak 269 buah terdiri atas 167 masjid, 40 musala, 19 langgar, 39 gereja Kristen, 1 gereja Katolik, 1 pura dan 2 wihara. Masjid, musala, dan gereja tersebar pada empat kecamatan dalam wilayah Kotamadya Palu, sedangkan pura hanya berada di Kecamatan Palu Timur, dan wihara hanya terdapat di Palu Barat. Persebaran yang tidak merata dari pura dan wihara mengikuti pusat-pusat pengelompokan pemukiman pemeluk agama Hindu dan Budha.

Di kalangan umat Islam, internalisasi ajaran Islam dilakukan lewat lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan formal Islam terdiri atas 12 Raudhatul Athfal, 20 madrasah tingkat Tsanawiyah (3 status Negeri dan 17 madrasah swasta), 6 madrasah tingkat Aliyah (2 status Negeri dan 4 madrasah swasta). Terdapat pula Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Palu yang membina beberapa jurusan dalam ilmu-ilmu keislaman.

Kegiatan dakwah Islamiyah dilakukan oleh lembaga sosial keagamaan Alkhairat, Muhammadiyah dan Darud Da'wah wal Irsyad (DDI). Alkhairat adalah lembaga sosial keagamaan yang paling besar dan berpengaruh di Kotamadya Palu. Lembaga ini didirikan oleh S. Idrus Aljufri pada tanggal

30 Juni 1930 M. dengan tiga kegiatan usaha, yaitu mengembangkan pendidikan yang bemaafaskan Islam mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, melakukan kegiatan dakwah untuk memperluas dan memperdalam ajaran-ajaran Islam, dan membentuk dan mengembangkan usaha-usaha sosial kemasyarakatan.

Muhammadiyah didirikan di Palu pada tahun 1959 oleh Ustaz Yusuf yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala. Sebelumnya, telah didirikan di Donggala pada tahun 1929 oleh Amir Pettalolo. Lembaga ini sejak berdirinya telah melakukan berbagai kegiatan dakwah, pendidikan dan kegiatan sosial.

Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) adalah lembaga sosial keagamaan yang didirikan di Mangkoso Sulawesi Selatan pada tahun 1939 M. oleh K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle. DDI didirikan di Kotamadya Palu pada tahun 1966 oleh dua orang bersaudara H. Abd. Halim Daeng Mattantu dan H. Abd. Rasyid. Keduanya dari suku Bugis pendatang yang berdomisili di Palu sejak tahun 1956, murid K.H. Muhammad Asad di Sengkang dan K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle di Mangkoso.

Dalam bidang dakwah, DDI memberikan khutbah, ceramah, dan pengajian di masjid-masjid dan kelompok-kelompok pengajian. Untuk pembinaan secara intern, DDI membentuk kelompok pengajian khusus anak-anak, remaja, dan ibu-ibu. Di bidang pendidikan, DDI mendirikan lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai tingkat Madrasah Aliyah. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, DDI mengumpulkan ZIS dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya, dan memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan.

Di samping ketiga organisasi dan lembaga sosial keagamaan tersebut, di Kotamadya Palu terdapat pula organisasi-organisasi lainnya yang melaksanakan kegiatan dakwah, atau kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), dan Al-Irsyad Al-Islamiyah.

Untuk melayani kegiatan dakwah, tersedia 896 rohaniawan Islam, terdiri atas 67 orang ulama, 249 muballig, 460 khatib, dan 120 penyuluhan agama. Kegiatan mereka pada umumnya terkoordinasikan dalam unit-unit organisasi yang telah disebutkan di atas.

Kegiatan keagamaan Ummat Kristiani di pusatkan di gereja-gereja yang didirikan oleh berbagai organisasi dan aliran Kristen. Jumlah organisasi

dan aliran Kristen di kota Palu sebanyak 27 buah terdiri atas 5 buah organisasi gereja yang berpusat di Sulawesi Tengah, dan 22 buah cabang gereja yang berpusat di luar Sulawesi Tengah. Organisasi gereja yang berpusat di Sulawesi Tengah ialah Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) di Tentena Kabupaten Poso, Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) di Kota Palu, Gereja Kristen Luwuk Banggai (GKLB) di Luwuk, Gereja Protestan Indonesia Buol Toli-Toli (GPIBT) di Toli-Toli, dan Gereja Protestan Indonesia Kepulauan (GPIBK) di Bulangi Banggai Kepulauan.

Umat Hindu yang ada di Kotamadya Palu terhimpun dalam satu organisasi tingkat Kotamadya yang disebut Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kotamadya Palu. Kegiatan keagamaan penganut agama Budha juga dilaksanakan di rumah ibadah mereka yang terdiri atas vihara dan cetya.

IV. DILEMA PANGGILAN DAN RESISTENSI

A. Sejarah

Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah disingkat FKAJW didirikan di Yogyakarta dan dideklarasikan pendiriannya di Solo pada hari Ahad, 14 Februari 1998. Forum ini, dengan demikian, berpusat dan berkedudukan di Yogyakarta. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dan berdasarkan pemahaman salafush-shalih, FKAJW merupakan organisasi massa yang bersifat keislaman, bergerak secara nasional dan mandiri. Simbol FKAJW dilambangkan dalam bentuk kitab terbuka di atas dua pedang bersilang dan bertuliskan "Lailaha illallah Muhammad Rosululloh" (bertuliskan huruf Arab). Forum ini dinyatakan sebagai organisasi yang bercorak keilmuan, terbuka, mandiri, dan kekeluargaan.

FKAJW bertujuan meningkatkan kualitas iman, keilmuan, dan peran serta muslimin Indonesia dalam pembangunan nasional menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Guna mencapai tujuan tersebut forum ini melakukan berbagai kegiatan antara lain (1) menyeleuggarakan dan terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits menurut pemahaman salafush-shalih; (2) menyelenggarakan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kalangan kaum muslimin baik pribadi maupun lembaga yang memiliki kesamaan tujuan serta tidak menyelisihi asas organisasi; (3) atas dasar prinsip-prinsip syariat Islam ikut mendorong

terciptanya suasana yang kondusif bagi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama "Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah" dipilih dengan beberapa alasan. Forum ini dimaksudkan sebagai sebuah lembaga yang *loosely organized*, tidak dimaksudkan sebagai sekte atau organisasi keagamaan yang mapan. Ia hanya dimaksudkan sebagai suatu majelis untuk berkomunikasi. Istilah Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah berkaitan dengan doktrin dan ideologi yang diyakini para pendukungnya. "Ahlus Sunnah" berarti orang yang mengamalkan Sunnah Rasulullah dan "al-Jama'ah" berarti kelompok mayoritas yang mengikuti Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. FKAJW hanyalah suatu wadah atau forum komunikasi bagi mereka yang *concerned* dengan jalan semacam ini. Namun demikian, mereka tidak punya pemahaman atau aliran tersendiri atau suatu hal yang berbeda secara teologis dengan umat Islam pada umumnya (Tim Peneliti Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Jakarta, 2001:h.58)

Makna yang tersirat dalam lambang tersebut yaitu cita-cita menegakkan kemuliaan Islam di hadapan musuhnya, menggunakan pedoman Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah dan para ulama pengikutnya. Pedang berwarna putih diharapkan upaya yang dilakukan oleh FKAJW tetap dalam misi suci yang mengembangkan amanat sebagai hamba Allah, sehingga apa yang digariskan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat terealisir di kalangan muslimin (Tim Peneliti Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Jakarta, 2001:h.60).

Usaha untuk mencapai kemuliaan, kehormatan, dan pengagungan Islam dan muslimin ditempuh dengan kekuatan senjata. Hal ini bukan berarti tanpa tuntunan dan mengutamakan sadisme, tetapi selalu berpedoman pada asas Al-Qur'an dan Hadits berdasarkan pemahaman shalafush shalih. Pedoman yang termaktub dalam kedua sumber tersebut di antaranya menyerahkan pemecahan masalah yang kiranya pemerintah masih mau dan mampu mengatasi sendiri, maka FKAJW menyerahkan pemecahannya kepada pemerintah yang adil.

B. Struktur Organisasi

Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal-Jama'ah datang di Palu menyusul terjadinya konflik agama di Poso tiga tahun lalu. Sebelumnya, sudah ada gerakan Islam lainnya di Palu seperti Jama'ah Tablig dan Islam Jama'ah yang kemudian berubah nama menjadi Lembaga Dakwah Islam

Indonesia (LDII). FKAJ pada awalnya bermakas di kota Poso, kemudian beberapa bulan terakhir ini baru pindah ke Palu setelah terjadinya proses rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Laskar Jihad lahir dari sebuah gerakan dakwah salafiah di Indonesia. Perintisnya adalah Ust. Ja'far Umar Thalib. Ia kelahiran Malang 29 Desember 1961, yang pernah berguru ke Persis Bangil, LIPIA, dan Maududi Institut di Lahore, Pakistan. Salah satu guru utamanya adalah Syeikh Mu'abil bin Had Al-Wadli di Damaz, Yaman Utara. Sepulang dari Timur Tengah pada 1993, ia mendirikan pesantren Ihya'us Sunnah di Yogyakarta. Pesantren ini merujuk pada dakwah salafiah yang dirintis Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi. Salafiah sendiri punya makna dakwah berdasarkan Alqur'an dan Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi.

Pengurus wilayah berpusat di Palu dengan nama Dewan Pengurus Wilayah Sulawesi Tengah. Susunannya adalah :

Dewan Pembina	Ustaz Mualim Shobari
Ketua Umum	ZubairAbu Abdillah,S.Pi
Sekretaris	Salman
Bendahara	Usamah
Ketua I	Yudi Abu Islami, S.Sos.
Ketua II	Abu Ahmad
Ketua III	Saefuddin, S.Sos.
Ketua IV	Ustaz Nawawi

Pembagian tugas pengurus dilakukan dengan menggunakan sistem kompartemen, dimana ketua satu membawahi divisi penerangan dan advokasi; ketua dua membawahi divisi dana dan ekonomi, ketua tiga membawahi divisi sosial dan pendidikan.

Dilihat dari latar belakang sosial, pengurus dan pengikut FKAJ mayoritas berasal dari pesantren yang memiliki semangat jihad yang tinggi dan tekad yang sama untuk menjaga kemurnian agama Islam, yaitu Tauhid di tengah-tengah masyarakat. Pengikut FKAJ berasal dari semua kalangan masyarakat tetapi yang paling dominan adalah mahasiswa jebolan pondok pesantren.

Rekrutmen pengurus tidak ditekankan pada latar belakang pendidikan agamanya melainkan pada wawasan dan kemampuan teknis yang dimiliki. Karena itu pada pengurus harian kelihatan didominasi oleh orang-orang

berlatar belakang pendidikan formal umum. "Yang penting spiritnya bukan pendidikan formalnya".

Pengikut FKAJW Palu lebih dominan dari daerah-daerah lain di Indonesia yang datang di Palu sebagai bagian dari tugas kelaskaran daripada orang Palu sendiri. Menurut Ustaz Nawawi, Ketua IV Bidang Kelaskaran DPW Sulawesi Tengah, jumlah anggota FKAJW di kota Palu tidak lebih dari 10 orang. Selebihnya adalah simpatisan yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Rekrutmen anggota pada umumnya berasal dari orang-orang pondok pesantren, yang sudah dibina melalui berbagai forum kajian dan merasa terpanggil untuk berjihad.

Nahrawi dan Ustaz Abu Ibrahim adalah dua orang tokoh muda FKAJW yang dapat menjadi representasi dari keanggotaan forum ini yang berintikan para mujahid dari luar Palu. Nahrawi kelahiran Kediri, 2 Desember 1977, adalah mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Karena panggilan jihad, ia kemudian datang di Palu dan meneruskan kuliah di Universitas Tadulako. Jabatannya di dalam FKAJW Sulawesi Tengah adalah Ketua IV yang membidangi kelaskaran. Tokoh lain adalah Komandan Laskar Jihad Poso, Abu Ibrahim, kelahiran Surabaya 3 Agustus 1973, masuk forum sejak forum ini berdiri pada tahun 1998. Ia adalah lepasan Pesantren Al-Najah, Yogyakarta.

Kedatangan di Palu atas dasar kesadaran sendiri meski harus diorganisir oleh Pengurus Pusat kerjasama dengan pengurus wilayah setempat. Jumlah anggotanya, dengan demikian, tidak tetap, tergantung kebutuhan di lapangan. Sampai organisasi ini dibubarkan pada awal bulan Oktober 2002 jumlah anggotanya tidak pernah pasti.

Pada awalnya pusat kegiatan FKAJW ditempatkan di Poso, di pusat daerah konflik. Dewan Pengurus Wilayah yang terlibat langsung ke daerah sambil membenahi kepengurusan di tingkat dua (kabupaten). Sekretariat di Palu baru dimulai sejak bulan Februari 2002 menyusul proses rekonsiliasi di Poso.

FKAJW menganut sistem menagemen modern yang memungkinkan tujuan organisasi bisa terlaksana. Salah satu aspek penting managemen modern adalah adanya pemimpin yang handal dan mampu mengendalikan dinamika organisasi. Karena itu, FKAJW memandang penting posisi ketua umum yang mampu merencanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan program kerja serta menghadapi tantangan di masa kini dan masa datang. Ketua umum periode pertama dijabat oleh Ustaz Zubair Abu Abdillah S.Pi

Untuk mengontrol berbagai divisi yang ada ketua umum membawahl empat orang ketua yang mengontrol divisi-divisi sehingga diharapkan pengaturan tiap divisi menjadi terarah. Susunannya meliputi Ketua I membidangi Divisi Penerangan dan Divisi Advokasi, Ketua II membidangi divisi dana dan divisi ekonomi, Ketua III membidangi divisi sosial dan divisi pendidikan dan kesehatan, Ketua IV membidangi divisi kelaskaran (gugus tugas laskar jihad).

Tugas pokok ketua umum adalah menetapkan perencanaan kerja organisasi, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program kerja, membina setiap unit yang ada di bawahnya, dan mewakili organisasi dalam urusan eksternal.

Perangkat organisasi yang lain adalah Sekretaris umum yang dijabat oleh Salman. Tugas yang diberikan kepadanya adalah melakukan tugas-tugas ketatausahaan, tugas keprotokoleran sekretariat, tugas-tugas kerumahtanggaan, dan pembinaan serta pengawasan kinerja administrasi. Sekretaris umum dibantu oleh empat biro, yaitu biro tata usaha, biro protokoler, biro organisasi dan biro rumah tangga.

Bendahara umum merupakan salah satu posisi vital dalam FKAJW. Bendaharalah yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja organisasi; mendistribusikan pengalokasian dana, melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, dan melakukan audit terhadap keuangan organisasi.

C. Faktor Pendorong

Menurut Salman, faktor pendorong lahirnya FKAJW adalah untuk menyatukan opini dari pondok pesantren mengenai kewajiban berdakwah kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan lembaga yang resmi hingga terbentuklah FKAJW. Semenjak digulirkan reformasi yang menuntut perubahan dalam segala bidang secara menyeluruh, yang terjadi pada dasarnya bukanlah perbaikan tetapi justru perubahan ke arah kesemrawutan. Perekonomian masyarakat dan negara lumpuh, politik tidak stabil, rasa aman menghilang, kejahatan merajalela, dan maraknya gerakan separatis, institusi keamaan sudah tidak dihiraukan dan cenderung termarjinalkan. Dalam kondisi demikian, tokoh-tokoh bangsa ini justru larut dalam euforia reformasi, berebut jabatan politik, akses ekonomi dan kepentingan-kepentingan golongan.

Perkembangan seperti itu justru paling banyak merugikan kaum muslimin sebagai penduduk mayoritas. Berbagai peristiwa yang menimpa

kaum muslimin berupa pelecehan agama, peminggiran peran, kezaliman-kezaliman dan merebaknya penyakit-penyakit sosial (judi, minuman keras, narkoba, pornografi) tidak mendapat penanganan serius dari pihak berwewenang, bahkan cenderung dibiarkan sehingga melukai perasaan keagamaan umat Islam. Peristiwa pembunuhan, pembantaian keji, pengusiran kaum muslimin yang terjadi di Poso melukai dan menyengsarakan kaum muslimin.

Dilatarbelakangi kondisi keagamaan dan kondisi sosial masyarakat Sulawesi Tengah seperti itu, maka FKAJW merasa terpanggil untuk turut membela kaum muslimin dari berbagai ancaman serta berusaha menyelamatkan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia yang notabene sebagai negara dengan jumlah penduduk muslimin terbesar di dunia.

Tahap-tahap ilmiah dilakukan dengan berkonsultasi kepada para ulama di berbagai negeri berkenaan dengan perkembangan sosial politik di Indonesia. Tahap berikutnya, forum ini melalui para ustaz memberikan nasehat kepada penguasa dan elit politik baik melalui surat maupun media-media yang ada, namun tidak mendapatkan tanggapan sesuai harapan umat.

Abu Ibrahim, menjelaskan bahwa FKAJW dibentuk berdasarkan fatwa jihad dari para ulama dan karena adanya perintah dari mereka untuk membentuk organisasi yang merupakan kategori "imaroh" (kepemimpinan) yang terbentuk sesuai dengan tuntutan Sunnah. FKAJW menjadi wadah bagi perjuangan Ahlussunnah Waljamaah pada berbagai bidang dalam upaya menyadarkan kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya berlandaskan Al-Qur'an dan Al-sunnah sesuai dengan pemahaman *al-salafu al-shalih* (sahabat, tabi'in, tabi'it - tabi'in).

FKAJW hadir untuk menjawab ketidakpastian nasib umat dan bangsa ke depan. Dimensi perjuangan yang semakin luas dengan segala kompleksitas potensi dan permasalahan yang mengiringinya, memerlukan adanya dukungan suatu struktur dan managemen organisasi yang tertata rapi, efisien dan efektif. Dukungan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif, dan dinamis menjadi sangat penting guna memperlancar kinerja organisasi.

D. Aktivitas

Menurut Sekretaris Umum DPW FKAJW Sulawesi Tengah, Salman, Inti kegiatan forum adalah berjihad dan membantu masyarakat Poso. Hal

itu merupakan refleksi dari lambang sebagai simbol utama forum yaitu gambar kitab dan pedang. Makna kitab adalah melambangkan kewajiban dan keutamaan belajar sedangkan pedang berarti lambang pembelaan terhadap umat Islam, jadi berkaitan dengan jihad.

Adapun sistem pembelajaran yang ditradisikan adalah sistem halaqah, yang di dalamnya dijelaskan bahwa jihad dalam Islam adalah wajib, sehingga melalui halaqah ini orang merasa terpanggil untuk masuk ke dalam forum. Sedangkan inti ajaran yang ditekankan adalah pengajaran tauhid.

Meski kegiatannya selama ini terkonsentrasi pada konsolidasi kekuatan membantu orang-orang Islam di Poso, tidak berarti forum tidak melakukan kegiatan lain di bidang pendidikan dan sosial. Program pendidikan dimulai tingkat pengenalan dasar agama melalui Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) yang dilakukan setiap hari sesudah shalat Ashar sampai Maghrib di masjid-masjid. Pengajian untuk tingkat anak-anak (6-12 tahun) ini sudah terbentuk 12 sektor dengan jumlah peserta kurang lebih 950 orang. Pada setiap sektor ditugaskan seorang anggota pengurus Satuan Tugas.

Selain itu dilakukan juga Pengajian Khusus (takhasus) untuk memperdalam pemahaman dan mempertinggi moral anggota dan pengurus. Pengajian ini menjadi dasar mutlak untuk menguji kualifikasi anggota dan dilaksanakan dengan disiplin tinggi. Untuk mengetahui kualifikasi peserta dilakukan ujian khususnya dalam bahasa Arab, Aqidah, dan Fiqhi. Materi pelajaran diberikan dengan menggunakan kitab-kitab kuning sebagaimana layaknya di pesantren. Anggota atau pengurus yang memenuhi kualifikasi tertentu melalui mekanisme ujian ini dapat dipromosikan menjadi Asisten Ustadz. Pimpinan tertinggi bergelar Ustadz, bukan kiai sebagaimana pada banyak organisasi Islam lainnya.

Kecuali pendidikan keagamaan bagi anak-anak dan para anggota dan pengurus, FKAJW Palu juga melakukan pengajian-pengajian untuk orang dewasa dari kalangan masyarakat umum dalam bentuk majelis taklim. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid setiap selesai shalat Maghrib dan sesudah Subuh. Majelis taklim ini sudah berkembang menjadi 12 kelompok tersebar ke desa-desa. Semua kegiatan di atas dikoordinasikan oleh Divisi Sosial-Pendidikan.

Program pendidikan dengan pola seperti di atas dilakukan untuk tetap mencitrakan FKAJW sebagai sebuah gerakan bercorak kesantrian. Dengan cara ini juga FKAJW berusaha membangun jaringan sosial yang luas. Secara teoritis jaringan sosial adalah faktor penting yang mempengaruhi rekrutmen ke dalam gerakan sosial. Gerakan cenderung merekrut kebanyakan anggota

barunya melalui jaringan anggota yang sudah ada. Dengan cara ini setiap anggota FKAJW harus mampu menjadi teladan yang dapat diikuti orang lain. Selain anggota terdapat kategori simpatisan dan ini tidak pernah terhitung banyaknya dan teridentifikasi orangnya. Mereka yang simpati terhadap gerakan ini biasanya merupakan pendukung dari belakang dan lebih banyak anonim. Bentuk keterlibatan mereka berupa kontribusi dan dukungan finansial atau logistik.

Melihat berbagai jenis dan bentuk kegiatan yang dilakukan FKAJW di lokasi penelitian menunjukkan adanya pola pengkaderan yang baku bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Adapun pola pengkaderan yang dimaksud adalah:

1. Pengkaderan awal dilakukan di pondok- pondok pesantren masing-masing;
2. Membina masyarakat setempat, anak-anak dan orang dewasa sesuai dengan kondisi daerah konflik;
3. Pengkaderan dilakukan dengan sistem halaqah yang merupakan ciri sistem pondok pesantren (semi pondok); dan
4. Pembinaan melalui tempat-tempat khusus dimana halaqah mungkin dilakukan seperti di masjid-masjid, kampus, dan rumah tangga.

Gerakan di bidang pendidikan berjalan seiring dengan penyebaran informasi lewat media yang secara khusus diterbitkan sebagai usaha untuk mengembangkan opini yang positif dan menepis opini negatif tentang gerakan. Media komunikasi dan informasi seperti Berita Laskar, buletin mingguan Al-Jihad, kaset dakwah dalam bentuk CD, website www.laskarjihad.or.id, tabloid Laskar Jihad dan penerbitan Jihad Press, semuanya diarahkan untuk maksud di atas.

Aktivitas lain yang dilakukan FKAJW di daerah konflik adalah pengumpulan dana dan kegiatan ekonomi. Dalam bidang ekonomi FKAJW di Poso mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan guna mendukung penguatan organisasi. Sedangkan dalam bidang pendanaan diusahakan dari para simpatian baik yang memberikan langsung kepada FKAJW dalam bentuk tunai, melalui rekening, atau melalui donatur tetap tetapi bersifat anonim. Dana yang terkumpul di samping digunakan untuk urusan administrasi kantor, juga untuk keperluan pendidikan dan kelaskaran.

Pengaruh baik langsung maupun langsung FKAJW terhadap masyarakat dalam arti umat Islam setempat terutama dirasakan dalam bidang pembelaan. Tidak dipungkiri bahwa kehadiran FKAJW di Palu

memiliki pengaruh terhadap masyarakat terutama umat Islam yang terlibat dalam konflik. Hal ini dirasakan sebagai dukungan bagi mereka untuk mempertahankan diri. Hal ini memang dapat dipahami bahwa kedatangan laskar jihad yang tergabung dalam FKAJW adalah merupakan panggilan terhadap kewajiban pembelaan umat Islam di daerah konflik di Poso.

Sebaliknya tentu saja kehadiran Laskar Jihad di Poso mendapat protes dari pihak lain yang melihat sebagai salah satu bentuk keterlibatan orang luar terhadap masalah interen orang Poso. Bahkan di kalangan organisasi keagamaan Islam sendiri ada yang kurang setuju dengan kehadiran Laskar Jihad di daerah konflik. Sedangkan pihak pemerintah setempat sendiri amat hati-hati menghadapi kenyataan ini. Kehadiran mereka di daerah konflik dilihat dalam kerangka penyelesaian masalah dan bukan sebagai salah satu sebab timbulnya atau lebih rumitnya masalah yang ada.

Menurut Ustaz Nawawi, masyarakat Palu sangat mendukung keberadaan forum ini, terbukti dengan banyaknya permintaan dari masyarakat untuk mengisi kajian-kajian keagamaan. Bahkan FKAJW sendiri sering kewalahan meresponi kebutuhan masyarakat akan pelayanan keagamaan, disebabkan kurangnya tenaga untuk itu. Forum ini juga masih harus melayani aspek lain dari permasalahan masyarakat misalnya kebutuhan akan pembinaan suku terasing di Palu dimana FKAJW juga ikut membina.

Pengaruh FKAJW juga amat terasa melalui dakwah yang dilakukannya. Kegiatan dakwah yang dilakukan tersebut adalah membina anak-anak di daerah konflik, khususnya mengajar mengaji (TK Al-qur'an), menyediakan buku-buku Iqra bagi kelompok-kelompok pengajian, membuka sekolah dasar Islam terpadu, dan membina sebanyak 1.283 orang santri khusus di daerah Poso yang tersebar di dua puluh sektor. Kitab-kitab yang digunakan dalam pengajian-pengajian halaqah adalah Ushul Al-Tsalatsah, Kasyaf Sahabah, Fathul Muin, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihien, Umdatul Ahkam, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Jalalain, dan Kutub al-Sittah.

Dalam bidang sosial FKAJW membantu masyarakat dalam menangani masalah kesehatan. Untuk keperluan ini forum telah membentuk "Ahmed", Ahlussunnah Wal Jamaah Medical Team. Dua buah poliklinik didirikan di Poso oleh bagian pelayanan kesehatan model Ahmed ini.

V.ANALISIS

Bagi FKAJW Palu media pendidikan, dakwah, sosial dan media komunikasi sangat membantu untuk komunikasi intern organisasi dan untuk kepentingan disseminasi visi dan misi ke masyarakat luas. Media ini juga dijadikan sebagai cara untuk terus menerus membangun *justifikasi* partisipasi dalam gerakan ini dan media melalui apa partisipan mengembangkan perbendaharaan motif-motif. Hal ini adalah *rationale* yang mengandung alasan-alasan partisipasi mereka sebagai antisipasi terhadap munculnya pertanyaan dari atasan, anggota keluarga, atau teman, atau masyarakat umum. Secara teoritis, perbendaharaan motif tidak hanya memfasilitasi rekrutmen anggota gerakan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme-pembangunan-komitmen (*commitment-building*mechanisms*). Mereka membantu partisipan *menjustifikasi* bagi dirinya sendiri melakukan pengorbanan atas nama gerakan. Semakin banyak pengorbanan yang dikeluarkan, maka semakin mahal biaya bagi suatu gerakan.

Konflik yang berkecamuk di Poso telah mengakibatkan tertumpahnya darah kaum Muslimin, kasih sayang antara anak-anak dan orang tua terputus, masjid porak-poranda pemukiman penduduk hancur, dan berbagai infrastruktur yang lain lumpuh. Bagi FKAJW Palu jihad *fi sabilillah* dalam arti seluas-luasnya merupakan jawaban terhadap berbagai petaka dan ancaman terhadap kaum Muslimin. Dengan jihad pula berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara bisa ditangkal dengan izin Allah SWT. Tujuannya dalam jangka pendek adalah membantu orang-orang Islam yang terzalimi tersebut, dan dalam jangka panjang mengembalikan kewibawaan kaum muslimin dengan menebar dakwah agar umat kembali kepada peribadahan semata kepada Allah dan menjadikan sunnah Nabi sebagai pembimbingnya.

Gugus Tugas Laskar Jihad (Divisi Kelaskaran) bertugas memulihkan kewibawaan umat Islam dan negara seperti disebutkan di atas. Semboyan mereka ' kami datang ke Poso untuk menyelamatkan kaum muslimin' merupakan refleksi tugas kelaskaran tersebut. Divisi kelaskaran dengan sub-sub divisi rekrutmen, perbekalan, sarana dan pengadaan, dan satuan tugas, merupakan front terdepan FKAJW secara fisik yang didukung dengan divisi lain di belakangnya.

Dalam kasus Poso mereka berpendapat bahwa kami tidak memusuhi atau membenci umat Kristen, yang dibenci adalah kezaliman dan fitnah. Laskar Jihad dari berbagai daerah di Indonesia datang dengan bekal

semangat jihad *fi sabilillah* untuk melindungi dan menyelamatkan umat Islam Poso. Ketika fitnah terjadi maka umat Islam wajib memeranginya. Perang adalah sebuah resiko, sampai fitnah berhenti. Hal itu juga terjadi karena lemahnya kinerja pihak pengamanan dan tidak berjalannya supremasi hukum.

Palu dan sekitarnya adalah ajang pertarungan orang luar sepanjang sejarah daerah itu. "Panasnya" Palu akhir-akhir ini bukan saja karena faktor garis khatulistiwa yang pas melintas di daerah ini tetapi juga merupakan faktor sejarah yang panjang. Pada masa kerajaan Gowa berkuasa di kawasan Timur Nusantara, Kerajaan Kaili, dimana Palu termasuk di dalamnya, merupakan salah satu daerah taklukan. Hasil-hasil bumi dari daerah tersebut dikirim ke Makassar sebagai upeti. Pasca Perjanjian Bungaya pada tahun 1667 VOC mengambil alih hegemoni atas wilayah itu dari tangan Kerajaan Gowa dan menguras hasil-hasilnya. Sebelumnya Kaili tunduk kepada Kesultanan Ternate kemudian tunduk kepada Kesultanan Makassar dan seterusnya ke tangan VOC. Benteng pertama Belanda di daerah Parigi berhasil dibangun pada tahun 1710 guna memaksakan keinginannya untuk mendapatkan kuota emas yang dibelinya di bawah harga pasaran.

Sementara kehadiran Belanda di daerah itu nanti dapat dipertahankan pada dekade terakhir abad ke-19, orang-orang Kaili asli telah lama berkenalan dengan kehadiran orang asing yang lain. Keseluruhan pantai barat dari pulau itu telah lama menjadi sasaran yang banyak dikunjungi para bajak laut dari Mindanao dan Sulu. Menurut legenda, Islam pertama kali dibawa ke wilayah itu pada tahun 1606 oleh Datu Karama, seorang pedagang dari Minangkabau. Perkembangan Islam di sepanjang pesisir kemudian dilanjutkan oleh para pedagang Arab, beberapa di antara mereka bermukim di Donggala dan Palu.

Namun demikian, pengaruh yang paling mendalam bagi penduduk setempat datang dari orang-orang Sulawesi Selatan, khususnya Mandar dan Bugis. Komunitas pesisir yang terbentang ke tenggara dari Sungai Lariang ke Donggala, di sekitar pesisir Teluk Palu, sampai ke bagian barat sering digambarkan sebagai wilayah orang Mandar.

Bagi orang-orang Kaili *To Mene* atau orang Mandar berjasa memperkenalkan mereka dengan Islam. Sementara Datu Karama boleh jadi telah berperan mengislamkan penguasa Palu dan Sigi, orang-orang Kaili percaya bahwa Islam bahkan telah diperkenalkan sebelumnya kepada orang Taweli oleh seorang Mandar yang dijuluki *Boela Ngisi* atau si Gigi Putih. Karena kuatnya hegemoni pendatang Mandar, pada akhirnya, *magau*

Palu meminta campur tangan langsung dari VOC untuk menghalau mereka dari Palu.

Selain adanya hegemoni Mandar di kerajaan-kerajaan pesisir seperti Banawa, pengaruh Bugis juga tidak dapat diabaikan. Setelah kontrol atas daerah Kaili berada kembali di pihak Belanda dari tangan Kesultanan Ternate pada tahun 1707, Gubernur VOC di Makassar mempercayakan daerah itu ke raja Bone tahun 1735, bukan saja untuk menerima upeti akan tetapi juga untuk melakukan intervensi jika diperlukan. Ketika pada abad ke-18 kekuasaan Bone semakin meningkat, sementara kekuasaan Company semakin menurun, peran politik orang Bugis di Kaili semakin besar. Bahkan putra pengganti *Tomanurun* dikenal dengan La Bugie (orang Bugis).

Kekuasaan politik orang Bugis di wilayah Kaili sejak lama berasal dari penguasaan mereka terhadap perdagangan lokal. Walaupun Palu dianggap sebagai pusat kedudukan kerajaan Kaili, kota itu sendiri dipandang sebagai pusat kekuasaan perdagangan orang Bugis.

Pemantapan administrasi pemerintahan Belanda pada akhir abad ke-19, juga merupakan kesempatan untuk melakukan penetrasi ke wilayah daratan Kaili. Orang Bugis tidak jarang mendapatkan posisi pada otoritas lokal, berkat dukungan mereka terhadap pemerintahan Belanda. Kesempatan ini juga dimanfaatkan orang Bugis untuk menyiarkan Islam di kalangan penduduk asli. Seorang misionaris Belanda, A.C.Kruyt mengakui lebih banyak memanfaatkan orang Bugis yang dianggapnya lebih kompeten, daripada orang-orang lokal.

Sejalan dengan proses islamisasi yang dilakukan oleh para pendatang, berlangsung pula gelombang kristenisasi. Orang asing pertama yang melakukan penetrasi ke daratan tinggi Kaili adalah missionaris reformis Belanda N.Adriani (seorang linguist) dan A.C.Kruyt (etnolog). Agar memudahkan untuk mengkonversi penduduk di daerah Poso, misionaris pertama kali didirikan pada tahun 1892. Bala Keselamatan secara resmi masuk di wilayah itu tahun 1913. Usaha missionaris mengalami kemajuan pesat di Lembah Palu dan sekitarnya. Ketika Kapten Edward Rosenlund sampai di Kalawara tahun 1919 sebanyak 6000 penduduk desa di daerah Kaili telah menjadi pengikut, dengan 55 bala tentara, dan 89 pengikut telah mengikuti pelatihan untuk menjadi petugas setelah menyelesaikan sekolah di Jawa.

Perjalanan Rosenlund bersama Woodward merupakan langkah menentukan dalam pemantapan peralihan sejumlah besar penduduk pegunungan ke dalam Kristen. Dari Kantewu usaha misionaris menyebar

sampai ke Pipikoro, Tobaku, Pekawa, Lindu, dan semua penduduk di Lembah Palu. Pertemuan awal selalu diawali dengan kumpulan di *lobo* setempat. Sekali suatu pos telah didirikan, usaha pertama yang harus dilakukan adalah mendirikan sekolah yang sekaligus berfungsi ganda sebagai tempat ibadah. Disana anak-anak desa diajar dasar bahasa Melayu, membaca dan menulis tetapi juga diajarkan Bibel, khutbah dan nyanyian komunal. Bahkan pemimpin-pemimpin desa pun seperti *maradika* Peana beralih ke Kristen.

Usaha missionaris mengalami peningkatan baik di Lembah Palu dan daerah ketinggian di sekitarnya pada tahun-tahun 1920-an dan 30-an. Terjemahan ajaran-ajaran Kristen digalakkan ke dalam bahasa Ija (bahasa Sigi) dan Moma (bahasa Kulawi). Pada tahun-tahun ini juga generasi pertama kader-kader yang belajar di Jawa telah kembali dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil di pegunungan. Tahun 1930-an Bala Keselamatan telah mencapai suatu korps yang terdiri dari 296 pegawai tersebar di 199 pos di Sulawesi. Tahun 1942, untuk Sulawesi Tengah saja, Komandan Woodward telah membangun 140 jaringan korps dan cabang, 19 sekolah, 5 klinik kesehatan, 66 pegawai. Pada tahun 1948 ketika Woodward mengakhiri tugasnya di Sulawesi Tengah, ia mengakui telah mengadakan 246 pertemuan sembahyang, yang dihadiri 31.257 orang, dan 1.548 dari mereka secara formal menyatakan penerimaan Kristen.

Gelombang berikutnya tengah terjadi dan entah kapan hal ini akan berlangsung tergantung bagaimana "kepanasan" Palu dikelola secara produktif oleh semua pihak. Di lapangan secara fisik dua pihak mewarnai gelombang ini. Tetapi sampai sekarang tidak jelas siapa pihak lain yang ada di antara keduanya. Boleh jadi kawasan ini merupakan titik yang berada dalam sebuah desain besar guna menjadikan bangsa ini menjadi tidak stabil dan mengundang intervensi lebih jauh. Kemampuan bertahan sebagai sebuah entitas masyarakat sepanjang sejarah, membuktikan bahwa sesungguhnya ada kearifan lokal yang menjadi benang merah ke arah terwujudnya persatuan yang tulus.

VI. KESIMPULAN

Kehadiran FKAJW di Palu tidak terlepas dari situasi konflik yang berkecamuk di daerah Poso. Daerah ini terlibat konflik karena managemen potensi konflik yang sepanjang sejarah merupakan masalah laten di Palu

tidak terkelola dengan baik. Karena itu kehadiran FKAJW merupakan panggilan untuk menegakkan keadilan.

Kehadiran FKAJW juga merupakan jawaban terhadap ketidak mampuan aparat keamanan dan penegak hukum memulihkan ketertiban dan menegakkan supremasi hukum. Alternatifnya adalah jihad. Jihad yang dilakukan di Palu (Poso) bertujuan untuk mengangkat kewibawaan Islam dan kewibawaan pemerintah, menjaga integritas NKRI.

Pendidikan agama dan media komunikasi merupakan strategi untuk melakukan justifikasi dan rasionalisasi terhadap gerakan mereka yang oleh kalangan luar sering dipandang kontroversial dan berusaha mendudukkannya dalam kerangka penegakan syariah secara murni dan konsekuensi.

Watak kesantrian, betapa pun, tetap merupakan ciri yang dibangun dan dicitrakan dalam diri anggota dan pengurus. Kecuali pemimpin tertinggi, pengurus FKAJW bersifat terbuka bagi anggota yang memiliki wawasan dan komitmen keislaman yang tinggi tanpa melihat latar belakang pendidikan formal.

Pengaruh kehadiran FKAJW di Palu amat terasa bagi umat Islam khususnya yang ada di daerah konflik. Hal ini dirasakan sebagai dukungan bagi perjuangan mereka mempertahankan diri dari pihak lain. Pengaruhnya juga dirasakan masyarakat dalam hal dakwah dan pendidikan Islam yang diselenggarakan meskipun waktunya cukup singkat. Akan tetapi bersamaan dengan itu resistensi juga muncul dengan rasionalisasi bahwa keikutsertaan pihak luar justru akan lebih memperkeruh suasana.

DAFTAR PUSTAKA

- Acciaioli, GL. 1989. *Searching For Good Fortune : The Making of a Bugis Shore Community at Lake Lindu, Central Sulawesi*. Disertasi tidak diterbitkan. Australian National University, Australia.
- Aziz, A. (ed.) 1989. *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* Pustaka Firdaus, Jakarta.

- Barth, F.1988. *Ethnic Groups and Boundaries* (diindonesiakan oleh Nining I Soesilo dengan judul: *Kelompok Etnik dan Batasannya*). UI Press, Jakarta.**
- Benda,H.J. 1974. *Kontinuitas dan Perubahan dalam Islam di Indonesia*, Tinta Mas, Jakarta**
- Boland, B.J. 1971. *The Struggle of Islam In Modern Indonesia*. The Hague - Martinus Nijhoff, Leiden.**
- Conolly, P.(ed.). 1999. *Approaches to the Study of Religion* (diindonesiakan oleh Imam Khoiri dengan judul : *Aneka Pendekatan Studi Agama*). LKiS,Yogyakarta.**
- Eickelman, D.F. dan James, P. 1998. *Muslim Politics* (diindonesiakan oleh Rofik Suhud dengan judul: *Ekspresi Politik Muslim*). Penerbit Mizan, Bandung.**
- Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. *Antropologi Indonesia*. No. 48. Tahun XV. Januari - April 1991**
- Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. *Antropologi Indonesia*. No.49. Tahun XV. Mei - Agustus 1991**
- Kipp, R.S. and Rodgers, S. (editors). 1987. *Indonesian Religions in Transition*. The University of Arizona Press, Arizona.**
- Noer, D. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Cet.II), LP3ES, Jakarta.**
- Schrieke, B. 1966. *Indonesian Sociological Studies*. W.Van Hoeve Publishers Ltd. The Hague, Amsterdam.**
- Shiddiqie, S. *Islam Kontemporer, Agama atau Ideologi* (Pesantren No.3/ Volume IV/1978)**
- Tim Peneliti Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Jakarta. 2001. *Gerakan Islam Radikal Kontemporer di Indonesia: Front Pembela Islam dan Laskar Jihad (FKAWJ)*. Hasil Penelitian. IAIN Syarif Hidayatullah dan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta.**
- Veeger, K.J. 1986. *Realitas Sosial*. PT Gramedia, Jakarta.**

- Warnaen, S. 2002. *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*. Mata Bangsa, Yogyakarta.
- Wouden, F.A.E. van 1985 *Klen, Mitos, dan Kekuasaan : Struktur Sosial Indonesia Bagian Timur* (diterjemahkan oleh Grafiti Pers). Jakarta : Grafiti Pers.
- Ziemek, M. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. P3M, Jakarta.